BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 186 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis DPMD yang selanjutnya disebut Renstra DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja DPMD yang selanjutnya disebut Renja DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran DPMD yang selanjutnya disebut RKA DPMD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja DPMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan DPMD untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra DPMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja DPMD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 yang akan digunakan DPMD untuk melaksanakan rencana kerja DPMD.
(2) Renja DPMD Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja DPMD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan DPMD;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja DPMD dengan dokumen RKPD dan Renstra DPMD;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran DPMD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja DPMD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA DPMD.

(2) Renja DPMD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra DPMD Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DPMD

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja DPMD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja DPMD tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DPMD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja DPMD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja DPMD meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab DPMD sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara DPMD dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja DPMD.

Pasal 7

(1) DPMD membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja DPMD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja DPMD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja DPMD tahun berjalan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala DPMD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMD dan evaluasi hasil Renja DPMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DPMD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja DPMD.

(3) Kepala DPMD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja DPMD.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja DPMD dilakukan pada saat penyusunan RKA DPMD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DPMD

Pasal 9

(1) Renja DPMD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran DPMD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra DPMD Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja DPMD tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 186

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

I. I. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026 Adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 20).

I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistimatika

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bandung
II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

II.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung
II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bandung

BAB V
PENUTUP

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
V.3. Rencana Tindak Lanjut

Soreang, Juli 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ttd.

TATA IRAWAN SUBANDI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR ..... - 13 -

DAFTAR TABEL ..... - 14 -

BAB I ..... - 15 -

1.1. Latar Belakang ..... - 15 -

1.2 Landasan Hukum ..... - 17 -

1.3 Maksud dan Tujuan ..... - 20 -

1.4 Sistematika Penyusunan ..... - 21 -

BAB II ..... - 23 -

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... - 23 -

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ..... - 40 -

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi ..... - 46 -

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD ..... - 48 -

Tabel II.5 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... - 49 -

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Masyarakat ..... - 59 -

BAB III ..... - 60 -

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi ..... - 60 -

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... - 64 -

3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan ..... - 74 -

BAB IV ..... - 83 -

BAB V 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Terkaitan Dokumen Perencanaan 16
Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 38
Gambar 2.2 Tema Pembangunan Lima Tahunan 48
Gambar 3.1 Cascading Misi Pembangunan 65

DAFTAR TABEL

Tabel II 1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dan Pencapaian Resntra Dinas Pemberdayaan Masyaraka dan Desa s/d Tahun 2023 Kabupaten Bandung ..... - 24 -
Tabel II 2 Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... - 43 -
Tabel II 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ..... - 45 -
Tabel II 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu-Isu Strategis.. - 46 -
Tabel II 5 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... - 50 -
Tabel III 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMD Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 ..... - 66 -
Tabel III 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... - 75 -
Tabel III 3 (T-C. 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan perangkat daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

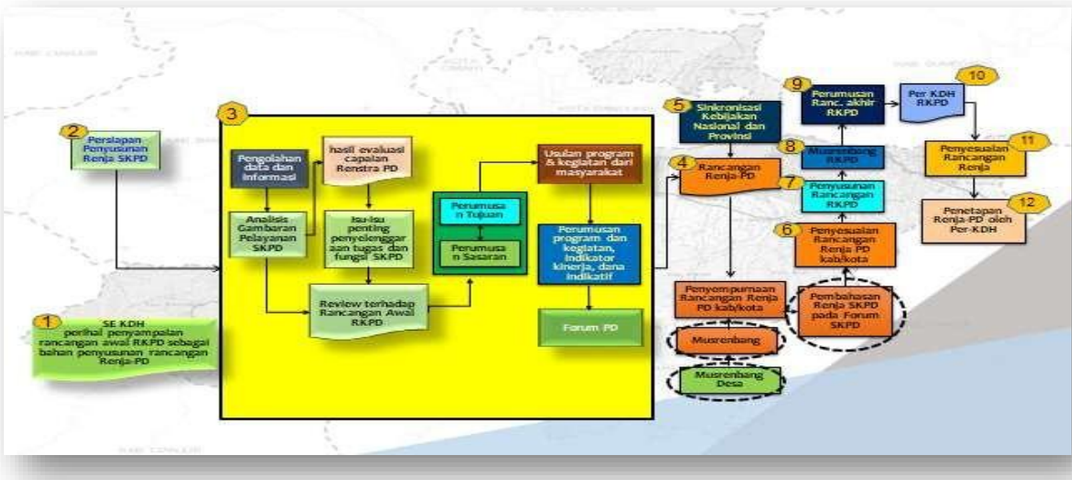
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RPJMD adalah Perubahan Renstra Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa;
16. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bandung melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya pada periode satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra rerangkat daerah dengan Rencana Kerja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, menjelaskan hal yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang disusun 1(satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan/sub kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan/sub kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2026 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja dinas tahun 2025, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari sub kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 Dinas PMD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Januari Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup kegiatan pada table II.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel II 1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dan Pencapaian Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Januari Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	75,89 Point 93,95%	79,70 Poin 93,63%	75.85 Point 93.75 Persen	80,40 Point 98,43 Persen	105,66 %	75,87 Point 93,85%	80,40 Point 98,43 Persen	105,36 %
2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	6 Dokumen	18 Dokumen	64,29%
2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00 %	7 Laporan	28 Laporan	80,00%
2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	-	N/A	N/A	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	120 Data	-	N/A	N/A	100,00 %	60 Data	60 Data	50,00%
2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98.75 Persen	98,75%	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400 Orang/bulan	560 Orang/bulan	40 Orang/bulan	37 Orang/bulan	92,50%	480 Orang/bulan	1484 Orang/bulan	61,83%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	120 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00 %	60 Dokumen	240 Dokumen	80,00%
2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	49 Dokumen	81,67%
2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	36 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00 %	18 Laporan	72 Laporan	80,00%
2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	N/A	N/A	0,00%	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-
2	13	1	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-
2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	0,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %
2	13	1	2,03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-
2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75 Persen	75,00%	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	N/A	-
2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	183 Paket	122 Paket	122 Paket	100,00 %	61 Paket	366 Paket	203,33 %
2	13	1	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Dokumen	48 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	52 Dokumen	96,30%
2	13	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	212 Dokumen	86 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	100,00 %	40 Dokumen	172 Dokumen	81,13%
2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	84 Orang	64 Orang	57 Orang	0 Orang	100,00 %	21 Orang	85 Orang	101,19 %

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	87.50 Persen	87,50%	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	24 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	26 Paket	96,30%
2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00 %	2 Paket	14 Paket	93,33%
2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	79 Paket	73 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00 %	2 Paket	77 Paket	97,47%
2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00 %	2 Paket	9 Paket	90,00%
2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	22 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00 %	2 Paket	26 Paket	92,86%
2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	9 Paket	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	8 Dokumen	88,89%
2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	N/A	1 Paket	0 Paket	100,00 %	1 Paket	1 Paket	20,00%
2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	250 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100,00 %	30 Laporan	340 Laporan	125,93 %

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	N/A	N/A	0,00%	-	2 Dokumen	66,67%
2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100,00 %	-	-	-
2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	46 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00 %	2 Unit	51 Unit	728,57 %
2	13	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-
2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %	2 Laporan	8 Laporan	80,00%
2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	48 Laporan	80,00%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	100,00 %	85 Persen	85 Persen	100,00 %
2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	4 Unit	80,00%
2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	30 Unit	21 Unit	21 Unit	100,00 %	3 Unit	54 Unit	94,74%
2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	31 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00 %	6 Unit	41 Unit	164,00 %
2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	4 Unit	100,00 %
2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2%	1,11 Persen	2 Persen	2,2 Persen	110,00 %	2 Persen	2,2 Persen	110,00 %
2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	100%	20 Persen	20 Persen	20 Persen	100,00 %	20 Persen	20 Persen	80,00%
2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Dokumen	2 Desa	1 Desa	1 Desa	100,00 %	1 Desa	4 Desa	80,00%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	7 Desa	2 Desa	2 Desa	100,00 %	2 Desa	11 Desa	84,62%
2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 Desa	10 Desa	5 Desa	5 Desa	100,00 %	5 Desa	20 Desa	80,00%
2	13	2	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	270 Desa	270 Desa	270 Desa	100,00 %	270 Desa	270 Desa	100,00 %
2	13	2	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	-	N/A	-
2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	3 Unit	75,00%
2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	25 Persen	10 Persen	5 Persen	5,48 Persen	109,60 %	5 Persen	20,48 Persen	81,92%
2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100,00 %
2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	50 Persen	11,48 Persen	10 Persen	11,48 Persen	114,80 %	10 Persen	45,92 Persen	91,84%
2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	80 Persen	14 Persen	16 Persen	16 Persen	100,00 %	18 Persen	60 Persen	75,00%
2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00%
2	13	4	2,01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	510 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	4	2,01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1350 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	100,00 %		540 Dokumen	40,00%
2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	3 Dokumen	14 Dokumen	93,33%
2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1022 Orang	859 Orang	810 Orang	810 Orang	100,00 %	50 Orang	1719 Orang	168,20 %

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	720 Laporan	43 Laporan	270 Laporan	270 Laporan	100,00 %	270 Laporan	583 Laporan	80,97%
2	13	4	2,01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	93 Dokumen	270 Dokumen	N/A	N/A	0,00%		270 Dokumen	290,32 %
2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	4	2,01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	0,00%		1 Laporan	25,00%
2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	270 Dokumen	1 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	270 Dokumen	100,00 %
2	13	4	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	241 Orang	341 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00 %	50 Orang	441 Orang	182,99 %

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50 Desa	20 Desa	270 Desa	270 Desa	100,00 %	10 Desa	270 Desa	100,00 %
2	13	4	2,01	0016	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	4	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Laporan	2 Dokumen	N/A	N/A	0,00%		2 Dokumen	40,00%
2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	98,00%	97,72 Persen	97,08 Persen	97,08 Persen	100,00 %	97,5 Persen	97,5 Persen	99,49%
2	13	5	2,01	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	95%	80 Persen	85 Persen	85 Persen	100,00 %	90 Persen	90 Persen	94,74%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	5	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
2	13	5	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	5	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	94 lembaga	2 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	100,00 %	1 lembaga	153 Lembaga	162,77 %
2	13	4	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Derah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
2	13	5	2,01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Unit	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	5	2,01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Unit	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	5	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	11 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %	2 Laporan	11 Laporan	100,00 %
2	13	4	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	5	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	48 Dokumen	80,00%

Sehubungan hal tersebut di atas, pengelolaan program/kegiatan /sub kegiatan dan pembinaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 dapat tercapai. Tercapai tidaknya pelakasanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanaan oleh Dinas PMD Kabupaten Bandung selama tahun 2024 serta perkiraan target tahun 2025.

Kinerja DPMD Kabupaten Bandung selain berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan periode sebelumnya juga dilihat dari ketrcapaian target SDG's Kabupaten Bandung. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidik yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusi dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasinperubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk Pembangunan berkelanjutan
15. Melindung, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan danbmerevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Sumber: sdgs.bappenas.go.id

Konsep TPB/SDGs memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola

kelembagaan. Pembangunan pilar sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan pilar ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluan kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan pilar lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pembangunan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Berdasarkan hasil analisis dalam rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026, terdapat 66 indikator TPB/SDGs yang disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jumlah indikator tersebut merupakan hasil reduksi terhadap indikator – indikator yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Bandung seperti indikator –indikator yang memiliki kekhususan seperti khusus untuk Kabupaten 3T, khusus untuk daerah yang terdapat danau dan wilayah sungai prioritas, khusus untuk kabupaten yang menjadi kota pusaka, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut telah mencakup 4 pilar pembangun yang terdiri atas 14 tujuan dan 41 target. Adapun jumlah indikator yang digunakan untuk menilai capaian indikator TPB/SDGs pada laporan ini berjumlah 85 indikator, dimana terdapat beberapa sub indikator yang merupakan penjabaran dari 66 indikator yang telah ditetapkan dalam RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026

Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada pada Pilar ke 2 yaitu Pembangunan Ekonomi tujuan SDG's ke sepuluh yaitu "Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara". Dengan sasaran "Pada tahun 203O, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 4O% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional" dengan indikator Jumlah Desa Mandiri.

tabel 2.2.
Rencana Capaian SDG's Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Nama Indikator SDGs	SATUAN	Tahun Dasar (Baseline)	Realisasi			Target					Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara												
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional												
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	119	162	186		126	146	166	186	206	DPMD
		%	44,07	60,00	68,89		46,67	54,07	61,48	68,89	76,30	

Kerangan : Jumlah desa Mandiri Berdasarkan IDM

Tabel 2.2 merupakan tabel perbandingan realisasi persentase jumlah desa mandiri tahun 2021-2023 dengan target jumlah desa mandiri tahun 2022-2026. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target jumlah desa mandiri di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 184 desa dengan pancapaian target sebesar 126% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 146 desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas PMD sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan memper-tanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat *(basic need approach),* pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat *(bottom up approach),* pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat *(community institusional approach),* berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat *(prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropite technologi approach)* serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach).*

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun tantangan dalam menentukan indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan desa yang belum maksimal;
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa;
3. Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal;
4. Lembaga ekonomi yang belum berfungsi dengan masksimal mencermati hasil analisis gambaran Rencana Strategis (Renstra).

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ke depan sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan
    a. Banyaknya desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai;
    b. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa;
    c. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama

untuk desa yang SDA nya terbatas di desa perbatasan; Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa;

d. Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa;
e. Perubahan Rencana Strategis DPMD 2021-2026;
f. Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPMD;
b. Adanya program Dana Desa, Alokasi Dana Perimbangan Desa, infrastruktur desa, dan Raksa Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT);
d. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat–provinsi Jawa Barat–Kabupaten Bandung antara lain: digitalisasi desa, penyediaan internet di lokasi desa yang *blankspot*, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.

Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Oportunities dan Threats*), baik terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. Analisis SWOT guna mengetahui strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel II 2
Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Faktor eksternal dan Faktor internal	Peluang (*opportunity*): a. Perubahan paradigma Pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; d. Kebijakan Pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan Kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan.	Tantangan (*threatment*): a. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Potensi sumber daya alam perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; c. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan; d. Perubahan paradigma dari pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*govermance*), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan.
Kekuatan (*strenght*): a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi pemberdayaan masyarakat; b. Pendampingan (Kerjasama dengan perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan); c. Tersedianya SDM aparatur; d. Koordinasi yang bai kantar perangkat daerah.	Alternatif strategi: a. Peningkatan kualitas kehidupan social ekonomi desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat; b. Pengembangan desa dan kawasan perdesaan melalui proses pendampingan; c. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pelestarian potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; d. Pengembangan konsep managerial (*marketing*) dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan.	

Berdasarkan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur;
2. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna

dan "*up to date*";

3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan administrasi desa;
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi;
6. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
7. Penguatan BUMDesa sebagai penggerak ekonomi di perdesaan;
8. Penguatan lembaga ekonomi perdesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, kerjasama ekonomi berbasis kawasan;
9. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pemanfaatan potensi desa yang berwawasan lingkungan;
10. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya serta kearifan lokal desa;
11. Peningkatan partisipasi aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk Renstra periode 2021-2026 sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
2. Aset dalam kondisi baik;
3. Meningkatnya Desa Mandiri;
4. Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif.

Capaian Kinerja dari keempat sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas dapat digambarkan pada Tabel II 2 (T-C.30) berikut.

Tabel II 3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi Tahun Ke-		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai Sakip PD			74,25	75,85	75,87	75,89	80,40		75,89		
2	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik			93,65	93,75	93,85	93,95	98,43		93,95		
3	Persentase Desa Mandiri			54,07	69,26	68,89	76,67	69,26*		76,67		
4	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif			92,00	97,80	97,50	98,00	98,50		98,00		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bandung antara lain adalah keterbatasan anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel II.4.

Tabel II 4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu-Isu Strategis

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
Belum meratanya Pembangunan di wilayah perdesaan	Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Banyaknya aparatur desa dan anggota BPD yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengadministrasian kegiatan yang dilakukan oleh desa.
		Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LKD.
		Belum optimalnya pemahaman pemerintah desa tentang LAD.
	Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa	Belum optimalnya peran LPM dalam perencanaan pembangunan dan pemahaman SDM pada LPM dalam memahami tupoksi dan keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya sinergitas perencanaan tingkat kabupaten dengan desa
	Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa	Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pengelolaan aset desa
		Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program kerja sama desa

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa	Belum optimalnya peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi
		Belum optimalnya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
		Belum optimalnya keterlibatan desa dan kawasan perdesaan di ekonomi
		Belum optimalnya keterlibatan koperasi dalam pemberdayaan ekonomi di desa
		Masih rendahnya desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa
	Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam pembangunan perdesaan.
		Masih kurangnya pengembangan teknologi tepat guna
	Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan stakeholders masyarakat	Belum optimalnya partisipasi PKK terkait bidang permberdayaan des/kelurahan.
		Belum optimalnya partisipasi posyandu terkait bidang permberdayaan desa/kelurahan.
		Belum optimalnya kolaborasi dengan PLUT dalam pemberdayaan potensi ekonomi di desa
	Belum optimalnya penataan desa	Kurangnya Pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemekaran desa. Banyak faktor-faktor keberatan masyarakat terhadap pemekaran desa

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan apabila tidak diantisipasi dengan factor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada Tindakan yang dilakukan makan akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DPMD Kabupaten Bandung yaitu :

1. Belum optimalnya penataan desa;
2. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa;

3. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
4. Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa;
5. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa;
6. Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan stakeholders Masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026 merupakan tahap pembangunan ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada periode tahun 2025-2045 adalah "Penguatan Fondasi melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola". Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan tema pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam setiap tahun, serta akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Tema Pembangunan Lima Tahunan
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025



Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun strategit pada tehapan pembanguan DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 selaras dengan tahap tema pembanguan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Berikut tahap tema pembangunan pada DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 :

Tabel II.5
Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahap I (2025)	**Tahap II (2026)**	**Tahap III (2027)**	**Tahap IV (2028)**	**Tahap V (2029)**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penguatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Pemantapan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan

Tema pembangunan Tahun 2026 yaitu “Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Kesejahteraan Masyarakat” mencerminkan upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penguatan dua pilar utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 yang selaras dengan tema Pembangunan Tahun 2026 dan Tahapan ke 2 Renstra DPMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Rumusan kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada semester kedua tahun berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan *review*. Adapun *review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II 5 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bandung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.228.318.463,00					35.477.828.000,00
2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	75,89 Point 93,95%	10.891.537.463,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	79.40 Poin 46,64 Poin	11.383.059.000,00
2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	24.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80,44 Poin	24.500.000,00
2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.500.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00
2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	9.646.337.463,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	9.686.809.000,00
2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	9.631.337.463,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00
2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	10.000.000,00
2	13	1	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
2	13	1	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
2	13	1	2,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	48.750.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	38.750.000,00
2	13	1	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.500.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-
2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	33.750.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	33.750.000,00
2	13	1	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	-
2	13	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40 Dokumen	2.500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	-
2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	21 Orang	5.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	5.000.000,00
2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	334.420.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500.470.000,00
2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00
2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.250.000,00
2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00
2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00
2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.800.000,00
2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	253.250.000,00
2	13	1	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	5.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.000.000,00
2	13	1	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
2	13	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	644.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	864.200.000,00
2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00
2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	589.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.200.000,00
2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	178.330.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	87 Persen	253.330.000,00
2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00
2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	115.000.000,00
2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30.000.000,00
2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2%	125.000.000,00	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	6%	1.125.000.000,00
2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20%	125.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	100 Persen	1.125.000.000,00
2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	25.000.000,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	5 Desa	1.025.000.000,00
2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	45.000.000,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	45.000.000,00
2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00
2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5%	125.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100%	125.000.000,00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	5 Desa	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10%	7.153.400.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persen 3 Persen	9.516.388.000,00
2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	20%	7.153.400.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Persentase BUM Desa Maju	100 Persen 3,70 Persen	9.516.388.000,00
2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	485.000.000,00
2	13	4	2,01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	270 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		
2	13	4	2,01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	6.128.400.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	8.508.060.000,00
2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	75.000.000,00
2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	31 Dokumen	25.000.000,00	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	-
2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	75.000.000,00
2	13	4	2,01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	-
2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		
2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	31 Orang	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	50.000.000,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0016	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Laporan	-
2	13	4	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	0 Dokumen	-
2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	73.328.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	98,00%	933.381.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	93,00 Persen 1,42 Persen	13.328.381.000,00
2	13	5	2,01	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	95%	933.381.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		,- Persentase PKK aktif - Persentase Posyandu aktif -Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.328.381.000,00
2	13	5	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00
2	13	5	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	135.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	610.000.000,00
2	13	5	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	300.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1 3	4	2.0 1	000 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	25.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	-
2	1 3	5	2,0 1	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
2	1 3	5	2,0 1	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00
2	1 3	5	2,0 1	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	10.000.000.000,00
2	1 3	4	2.0 1	000 8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
2	1 3	5	2,0 1	000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	363.381.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	2.308.381.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja tahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang tidak memiliki pagu kewilayahan sehingga tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas perekomendasi Bantuan Keuangan Kepada Desa, sehingga Dinas PMD berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi yaitu memfasilitasi pemerintah desa dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Tabel II.6 TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Pembahasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan, selain berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025 yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional (ASTA CITA) sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Uraian terhadap 8 (delapan) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung visi Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 mengaci pada RPJMD Provisi Jawa Barat tahun 2025-2029 yang didasari pada misi "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata". Perwujudan pembangunan Provisi Jawa Barat yaitu 1) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing, 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini, 3) Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional dan ke 4) Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjungjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance) yang dapat dijabarkan pada tujuan dan Sasaran, sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya derajat kesehatan individu;
   b. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
   c. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
   d. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
   e. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi

Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran :

a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
c. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
d. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.

Tujuan 2.2 : Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
b. Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
c. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;
b. Meningkatnya Ketrampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
c. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.

Tujuan 4.1 : Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
b. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan.

Tujuan 4.2 : Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih, dengan sasaran :

Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang pada Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera", Visi tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan terpilihnya kepala daerah masa jabatan 2025-2029 yang membawa visi "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dengan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; dan
5. Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban Umum.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-empat yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi".

Gambar 3.1

Cascading Misi Pembangunan 4



Sumber : Bapperida Kabupaten Bandung

Dalam mewujudkan misi ke-4 tersebut adapun arah tujuan yang akan di capai yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah berbasis infastruktur yang terintegrasi, berketahan dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja utama “Indeks Perkembanga Wilayah”, serta dengan sasaran yang dituju yaitu “Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan” dengan indikator sasaran “Persentase Desa Mandiri”.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan visi dan misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026, sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan”.

Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa tujuan dan sasaran sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				(2024)	2025	2026	2027	2028	2029	
I	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri	49,63%	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	64,81%
I.1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan status desa mandiri	N/A	16,42%	2,56%	3,75%	1,81%	3,55%	3,55%

Pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan, kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator pada Tabel dibawah ini:

.

Tabel III.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa				Persentase Desa Mandiri		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			Persentase peningkatan status desa mandiri		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terselenggaranya fasilitasi Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tatakelola Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 2. Persentase BUM Desa Maju	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase PKK aktif 2. Persentase Posyandu aktif 3. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK, Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. pengembangan kapasitas keuangan desa. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan. peningkatan ekonomi perdesaan. peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja. pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. pemberdayaan adat dan sosial budaya. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2024 Rumusan Rencana Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. sebagaimana tercantum dalam tabel III.3 berikut :

Tabel III.3 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027
Kabupaten Bandung

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.477.828.000,00					24.648.450.000,00
2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	79.40 Poin 46,64 Poin	11.383.059.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	79.55 Poin 47,50 Poin	11.412.009.000,00
2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80,44 Poin	24.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80,46 Poin	24.500.000,00
2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	9.686.809.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	9.686.809.000,00
2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00
2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	10.000.000,00
2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	38.750.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	48.750.000,00
2	13	1	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.500.000,00
2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	33.750.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	33.750.000,00
2	13	1	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.000.000,00
2	13	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	41 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	5.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	5.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500.470.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	519.420.000,00
2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00
2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.250.000,00
2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00
2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00
2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.800.000,00	Penyediaan Bahan/Material	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	253.250.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	250.000.000,00
2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.000.000,00
2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	864.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	864.200.000,00
2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00
2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.200.000,00
2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	87 Persen	253.330.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	88 Persen	253.330.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00
2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	115.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	115.000.000,00
2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30.000.000,00
2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00
2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	6%	1.125.000.000,00	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	10%	125.000.000,00
2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	100 Persen	1.125.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	100 Persen	125.000.000,00
2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	5 Desa	1.025.000.000,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	5 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	45.000.000,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	45.000.000,00
2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	125.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	5 Desa	125.000.000,00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	5 Desa	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persen 3 Persen	9.516.388.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persen 3 Persen	12.233.060.000,00
2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Persentase BUM Desa Maju	100 Persen 3,70 Persen	9.516.388.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Persentase BUM Desa Maju	100 Persen 5,55 Persen	12.233.060.000,00
2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	485.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	8.508.060.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	8.508.060.000,00
2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	75.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	75.000.000,00
2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	3.050.000.000,00
2	13	4	2,01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		-	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	31 Orang	25.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	62 Orang	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0016	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		-	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	25.000.000,00
2	13	4	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		-	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	73.328.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,00
2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	93,00 Persen 1,42 Persen	13.328.381.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	93,00 Persen 2,13 Persen	753.381.000,00
2	13	5	2,01	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		,- Persentase PKK aktif - Persentase Posyandu aktif -Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.328.381.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		,- Persentase PKK aktif - Persentase Posyandu aktif -Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	753.381.000,00

Kode					Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00
2	13	5	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	610.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	85.000.000,00
2	13	5	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	300.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	100.000.000,00
2	13	4	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	25.000.000,00
2	13	5	2,01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	5	2,01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00
2	13	5	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	10.000.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	100.000.000,00
2	13	5	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	2.308.381.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	308.381.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. baik yang bersifat teknokratis. *top down. buttom up* maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat *top down*. merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat *buttom up*. merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang di-*input* kedalam aplikasi SIPD. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung.

Pendanaan tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya mengakomodir yang bersifat teknokratis dan *top down.* Pendanaan dari pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2026. Adapun rencana program. kegiatan. dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2026 terlampir pada tabel IV.I sebagai berikut :

Tabel IV.I
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Tahun 2026

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.477.828.000,00	
		2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		79.40 Poin 46,64 Poin	11.383.059.000,00	
		2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		80,44 Poin	24.500.000,00	
		2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	6 Dokumen	4.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	3.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	3.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	2 Laporan	4.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	7 Laporan	3.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DPMD Kabupaten Bandung	60 Data	1.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100 Persen	9.686.809.000,00	
		2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kabupaten Bandung	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	60 Dokumen	2.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	12 Dokumen	2.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Laporan	2.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPMD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	18 Laporan	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD		100 Persen	10.000.000,00	
		2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	1 Laporan	10.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		100 Persen	38.750.000,00	
		2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMD Kabupaten Bandung	41 Paket	33.750.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kabupaten Bandung	60 Orang	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	500.470.000,00	
		2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	1 Paket	15.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	2 Paket	100.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	2 Paket	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	2 Paket	8.250.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	2 Paket	40.170.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	1 Paket	23.800.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kabupaten Bandung	48 Laporan	253.250.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	5.000.000,00	
		2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	864.200.000,00	
		2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kabupaten Bandung	2 Laporan	10.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	12 Laporan	45.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMD Kabupaten Bandung	12 Laporan	809.200.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		87 Persen	253.330.000,00	
		2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMD Kabupaten Bandung	1 Unit	38.330.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMD Kabupaten Bandung	18 Unit	115.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMD Kabupaten Bandung	6 Unit	30.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD Kabupaten Bandung	1 Unit	70.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa		6%	1.125.000.000,00	
		2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan		100 Persen	1.125.000.000,00	
		2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	5 Desa	1.025.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Desa	45.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Desa	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	2	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	270 Desa	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		100%	125.000.000,00	
		2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa		5 Desa	125.000.000,00	
		2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Dokumen	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100 Persen 3 Persen	9.516.388.000,00	
		2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Persentase BUM Desa Maju		100 Persen 3,70 Persen	9.516.388.000,00	
		2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Dokumen	485.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	270 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	4 Dokumen	8.508.060.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	124 Orang	75.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	270 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Laporan	75.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	31 Orang	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	270 Desa	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
3		2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Dokumen	73.328.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		93,00 Persen 1,42 Persen	13.328.381.000,00	
		2	13	5	2,01	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	,- Persentase PKK aktif - Persentase Posyandu aktif -Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.328.381.000,00	
		2	13	5	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	35.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	610.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	5	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 lembaga	300.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	2,01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	2,01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Laporan	10.000.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
		2	13	5	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LKD, LAD dan Masyarakat Kabupaten Bandung	6 Dokumen	2.308.381.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance*. yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung tahun 2026 yang berisi prioritas program. kegiatan. dan sub kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi. dapat lebih terkoordinasi. terakomodasi. terintegerasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ttd

TATA IRAWAN SUBANDI

BUPATI BANDUNG.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA